

## STRATEGI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) KODAM XIII/MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI UTARA

*The Strategy of Military Operations Other Than War (MOOTW) by Kodam XIII/Merdeka  
in Enhancing the Social Resilience of Communities in North Sulawesi*

Hendrasari Nurhono<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia

[\\*hendrasari.nurhono@email.com](mailto:hendrasari.nurhono@email.com)

*Abstract. Indonesia, as an archipelagic state with diverse ethnic, religious, and cultural backgrounds, possesses strategic potential while simultaneously facing vulnerabilities if not properly managed. North Sulawesi, located on the border with the Philippines, holds a crucial geopolitical position yet confronts complex challenges such as population mobility, ideological infiltration, and cross-border threats. Within this context, Military Operations Other Than War (OMSP) conducted by Kodam XIII/Merdeka serve as a strategic instrument to strengthen social resilience in a society and maintain regional stability. This study aims to analyze the actual conditions of Kodam XIII/Merdeka in implementing OMSP and to formulate strategies employed to enhance social resilience within North Sulawesi's communities. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving stakeholders from regulatory authorities, operational units, and community or expert representatives. The findings reveal that Kodam XIII/Merdeka implements OMSP through preventive and humanistic approaches, including territorial development, social communication, and cross-sectoral synergy. The main challenges identified include limited resources, geographical constraints, and complex social dynamics. Effective strategies are achieved through multi-stakeholder collaboration, the reinforcement of multicultural values, and the optimization of the Total People's Defense System (Sishankamrata). The study concludes that OMSP strategies of Kodam XIII/Merdeka contribute significantly to strengthening social resilience in North Sulawesi's society. These findings are expected to provide academic contributions to defense studies and serve as practical references for formulating non-military defense policies in other multicultural regions of Indonesia.*

*Keywords: OMSP, Kodam XIII/Merdeka, Social Resilience, Multiculturalism, Defense Strategy*

**Abstrak.** Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, agama, dan budaya memiliki potensi strategis sekaligus kerentanan sosial apabila tidak dikelola secara tepat. Sulawesi Utara, sebagai wilayah perbatasan dengan Filipina, menempati posisi geopolitik yang penting namun menghadapi tantangan

kompleks berupa mobilitas penduduk, infiltrasi ideologi, serta ancaman lintas batas. Dalam konteks tersebut, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan Kodam XIII/Merdeka menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi aktual Kodam XIII/Merdeka dalam pelaksanaan OMSP serta merumuskan strategi yang ditempuh guna meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di Sulawesi Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari unsur regulator, operator, dan tokoh masyarakat/ahli. Hasil penelitian mengungkap bahwa Kodam XIII/Merdeka melaksanakan OMSP dengan pendekatan preventif dan humanis melalui pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta sinergi lintas sektor. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang menantang, serta dinamika sosial yang kompleks. Strategi efektif diwujudkan melalui kolaborasi multi-stakeholder, penguatan nilai multikulturalisme, serta optimalisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa strategi OMSP Kodam XIII/Merdeka berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan sosial masyarakat di Sulawesi Utara. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pertahanan serta menjadi rujukan praktis dalam perumusan kebijakan pertahanan non-militer di wilayah multikultural Indonesia.

Kata kunci: OMSP, Kodam XIII/Merdeka, Ketahanan Sosial, Multikulturalisme, Strategi Pertahanan

## LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, budaya, dan agama menghadapi tantangan pertahanan yang unik. Sulawesi Utara, sebagai wilayah multikultural sekaligus perbatasan dengan Filipina, memiliki posisi strategis namun juga rentan terhadap ancaman nonmiliter, seperti radikalisme, konflik horizontal, serta kejahatan lintas batas. Dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki mandat untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat ketahanan sosial

masyarakat.

Stabilitas sosial di Sulawesi Utara relatif baik, tercermin dari indeks kerukunan umat beragama yang tinggi, tetapi tetap menyisakan potensi gesekan antaridentitas akibat dinamika politik, ekonomi, maupun arus globalisasi. Sejarah konflik di kawasan timur Indonesia menjadi pelajaran bahwa harmoni sosial tidak bisa dibiarkan berjalan secara alamiah tanpa upaya penguatan berkelanjutan. Kehadiran TNI melalui OMSP menjadi instrumen penting dalam mengisi ruang pencegahan dan pembinaan teritorial.

Selain faktor internal, ancaman eksternal seperti infiltrasi ideologi transnasional, narkoba, serta penyelundupan lintas batas semakin menekan kebutuhan akan strategi OMSP yang humanis, adaptif, dan kolaboratif. Kodam XIII/Merdeka berada di garis depan upaya ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga tokoh masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan paradigma *human security* yang menekankan perlindungan masyarakat dari kerentanan nonmiliter.

Namun, pelaksanaan OMSP dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, tantangan geografis kepulauan, dan koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian untuk mengevaluasi strategi Kodam XIII/Merdeka dalam OMSP guna memperkuat ketahanan sosial masyarakat multikultural di Sulawesi Utara. Penelitian ini sekaligus mengisi celah kajian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada konteks nasional atau wilayah lain.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teoretis penelitian ini berpijak pada kerangka konseptual Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh komponen bangsa—pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat—sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara. Konsep ini mengandung makna bahwa

pertahanan nasional bukan semata tanggung jawab militer, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap warga negara (Suhadi, 2021). Dalam kerangka ini, **Operasi Militer Selain Perang (OMSP)** memiliki peran strategis sebagai bentuk aktualisasi fungsi TNI dalam situasi damai, yakni membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rachman, 2020).

OMSP diposisikan sebagai instrumen strategis nonperang yang berfungsi menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional. Peran tersebut meliputi kegiatan seperti bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, serta pembangunan karakter bangsa melalui komunikasi sosial dan pembinaan teritorial. Dengan demikian, OMSP merupakan strategi pertahanan adaptif yang berorientasi pada **penguatan ketahanan sosial masyarakat** sebagai lapisan awal dari ketahanan nasional (Widodo, 2022).

### **Konsep Ketahanan Sosial**

Konsep **ketahanan sosial** menjadi landasan penting untuk menilai kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman dan guncangan sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut Adger (2000), ketahanan sosial (social resilience) didefinisikan sebagai kemampuan individu dan komunitas untuk menahan tekanan eksternal, beradaptasi terhadap perubahan, dan memulihkan diri dari krisis. Dimensi utama dari ketahanan sosial meliputi kepercayaan (trust), jejaring sosial (social networks), dan norma bersama (shared norms) yang berfungsi sebagai modal sosial dalam menjaga stabilitas komunitas (Putnam, 2001).

Dalam konteks Indonesia, ketahanan sosial tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong yang menjadi perekat sosial masyarakat. Upaya memperkuat ketahanan sosial harus memperhatikan faktor budaya, ekonomi, dan politik yang saling memengaruhi. Penelitian Suryani dan Nurlina (2020) menegaskan bahwa keberhasilan suatu wilayah dalam menjaga stabilitas sosial

sangat bergantung pada kohesi komunitas serta efektivitas institusi sosial dalam mengelola konflik dan keragaman (Halkis, 2022).

### **Multikulturalisme dan Kohesi Sosial**

Sulawesi Utara dikenal sebagai wilayah dengan tingkat **multikulturalisme** yang tinggi. Keberagaman etnis, agama, dan budaya menuntut adanya pengakuan, penghormatan, serta dialog antar komunitas. Teori multikulturalisme (Taylor, 1994) menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya yang beragam sebagai dasar pembentukan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, TNI—melalui pelaksanaan OMSP—berperan sebagai fasilitator dan penjaga harmoni sosial. Kodam XIII/Merdeka, misalnya, memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan melalui kegiatan komunikasi sosial yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan nasionalisme (Saputra, 2023).

OMSP dalam konteks multikultural tidak hanya diarahkan pada kegiatan fisik, tetapi juga mencakup aspek ideologis, yaitu memperkuat integrasi nasional di tengah pluralitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan “defense diplomacy” yang menempatkan kekuatan militer sebagai instrumen pembangun kepercayaan publik dan harmoni sosial (Rahman, 2021). Dengan demikian, OMSP menjadi jembatan antara dimensi pertahanan dan pembangunan sosial, serta alat diplomasi domestik dalam memperkokoh kesatuan bangsa.

#### **Teori Strategi: Pendekatan Ends–Ways–Means**

Untuk memahami efektivitas pelaksanaan OMSP, digunakan pendekatan **strategi militer dengan kerangka Ends–Ways–Means (EWM)** sebagaimana dikemukakan oleh Lykke (1989). Kerangka ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan strategi ditentukan oleh keseimbangan antara tiga unsur utama: tujuan (Ends), cara (Ways), dan sarana (Means).

Dalam konteks Kodam XIII/Merdeka, **Ends** diarahkan pada terciptanya stabilitas sosial dan peningkatan ketahanan masyarakat. **Ways** diwujudkan melalui

pembinaan teritorial, komunikasi sosial, kegiatan bakti TNI, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Adapun **Means** mencakup sumber daya manusia, anggaran, logistik, serta dukungan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan pertahanan nonmiliter (Dewantara, 2022).

Model EWM ini membantu mengevaluasi apakah OMSP dijalankan secara proporsional, efektif, dan berkesinambungan. Ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan inefisiensi strategi dan melemahkan hasil akhir. Misalnya, jika tujuan sosial sudah ditetapkan tetapi dukungan sumber daya atau cara pelaksanaannya tidak optimal, maka strategi OMSP akan menghadapi kendala implementatif (Kane, 2020).

### **OMSP dalam Perspektif Pertahanan Nonmiliter**

OMSP juga dapat dipahami dalam kerangka **pertahanan nonmiliter** (non-military defense), yaitu strategi penggunaan kekuatan militer untuk tujuan kemanusiaan, pembangunan, dan stabilitas sipil (Baylis et al., 2017). Fungsi ini menjadi semakin relevan pada era kontemporer, ketika ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan juga melibatkan ancaman nirmiliter seperti bencana alam, pandemi, kejahatan siber, dan disinformasi.

TNI, khususnya Kodam XIII/Merdeka, memiliki peran signifikan dalam mengintegrasikan dimensi keamanan dan kesejahteraan. Melalui program seperti **Pembinaan Teritorial (Binter)**, TNI membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan sekaligus memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi krisis. Kegiatan bakti sosial, pembangunan infrastruktur desa, dan penyuluhan kebangsaan menjadi instrumen konkret dalam memperkuat daya tahan sosial masyarakat Sulawesi Utara (Sihombing, 2021).

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *Human Security*, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari keamanan nasional. Konsep tersebut menekankan

perlindungan terhadap kebutuhan dasar, hak asasi, dan kesejahteraan masyarakat (UNDP, 1994). Dengan demikian, OMSP bukan hanya strategi militer, tetapi juga strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

### **Sinergi Pentahelix dalam OMSP**

Dalam implementasi OMSP, pendekatan **Pentahelix** menjadi relevan karena menuntut kolaborasi antara lima unsur utama: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Pendekatan ini memperkuat konsep *whole-of-nation approach* dalam pertahanan negara, di mana setiap unsur berperan sesuai kapasitasnya. Kodam XIII/Merdeka berfungsi sebagai simpul penggerak sinergi ini, memastikan setiap pihak memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan sosial.

Melalui kolaborasi Pentahelix, OMSP dapat menjadi platform integratif antara pertahanan dan pembangunan daerah. Misalnya, keterlibatan akademisi membantu menyediakan data dan analisis kebijakan, sektor bisnis berperan dalam mendukung logistik dan ekonomi masyarakat, media membantu memperkuat narasi nasionalisme, sementara komunitas menjadi pelaksana di lapangan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, OMSP menjelma menjadi strategi sosial nasional yang adaptif dan inklusif (Sari, 2023).

### **Kerangka Analitis**

Berdasarkan uraian teoretis di atas, kerangka analitis penelitian ini menggabungkan tiga landasan utama:

- a. **Konsep Sishankamrata**, sebagai kerangka pertahanan negara berbasis partisipasi seluruh komponen bangsa;
- b. **Teori Ketahanan Sosial dan Multikulturalisme**, untuk memahami dinamika sosial masyarakat Sulawesi Utara yang plural dan beragam; dan
- c. **Model Strategi Ends–Ways–Means**, sebagai alat evaluatif untuk menilai

efektivitas pelaksanaan OMSP.

Integrasi ketiga kerangka tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap strategi Kodam XIII/Merdeka dalam menjalankan OMSP. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek operasional militer, tetapi juga menyoroti kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan pembangunan karakter kebangsaan. OMSP pada akhirnya menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya tahan bangsa terhadap ancaman nirmiliter, terutama di wilayah-wilayah dengan keragaman sosial yang tinggi seperti Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode deskriptif kualitatif** dengan pendekatan **studi kasus** untuk menggambarkan secara mendalam strategi *Operasi Militer Selain Perang* (OMSP) Kodam XIII/Merdeka dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah Sulawesi Utara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik, kontekstual, dan mendalam melalui eksplorasi terhadap berbagai sumber data (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus dianggap relevan untuk menelaah implementasi kebijakan dan strategi pertahanan nonmiliter yang bersifat kompleks, melibatkan banyak aktor, dan terjadi dalam konteks sosial tertentu (Yin, 2018).

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu **wawancara mendalam**, **observasi partisipatif**, dan **studi dokumentasi**.

- a. **Wawancara mendalam** dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri atas unsur **regulator** (pemerintah daerah dan perwakilan TNI), **operator Kodam XIII/Merdeka** (pejabat staf teritorial dan satuan pelaksana), serta **tokoh masyarakat** (pemuka agama, adat, dan pemuda). Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali persepsi, strategi, dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan OMSP.

- b. **Observasi partisipatif** dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, dan kegiatan bakti TNI di lapangan untuk memahami dinamika interaksi antara aparat pertahanan dan masyarakat.
- c. **Dokumentasi** mencakup analisis terhadap dokumen resmi, laporan kegiatan, serta arsip publikasi yang relevan untuk memperkuat data empiris hasil wawancara dan observasi.

### **Analisis dan Validasi Data**

Analisis data dilakukan melalui tahapan **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan** sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Validitas data dijaga dengan menerapkan **triangulasi sumber, teknik, dan waktu**, guna memastikan konsistensi dan keandalan informasi yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan hasil secara komprehensif dan kredibel sesuai dengan konteks sosial dan strategis pelaksanaan OMSP di Sulawesi Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Kodam XIII/Merdeka berkontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sulawesi Utara. Implementasi OMSP dilakukan melalui beberapa strategi utama, antara lain: pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Pertama, pada aspek pembinaan teritorial, Kodam XIII/Merdeka secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan wilayah melalui karya bakti, penyuluhan bela negara, serta pendampingan masyarakat dalam program-program sosial. Hal ini tidak hanya membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran

militer di luar fungsi tempurnya. Temuan ini sejalan dengan teori ketahanan sosial (Adger, 2000) yang menekankan pentingnya kohesi sosial dalam menghadapi ancaman eksternal maupun internal.

Kedua, pada aspek komunikasi sosial, Kodam mengedepankan pendekatan humanis dengan memfasilitasi dialog lintas agama, sosialisasi multikultural, serta program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda. Upaya ini terbukti efektif dalam mencegah potensi konflik horizontal dan memperkuat toleransi antar kelompok. Data wawancara dengan tokoh agama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menunjukkan bahwa kehadiran Kodam sebagai fasilitator dialog mampu menurunkan ketegangan antar komunitas. Hal ini sejalan dengan teori multikulturalisme (Parekh, 2000), yang menekankan pentingnya penghormatan dan pengakuan identitas budaya dalam masyarakat majemuk.

Ketiga, pada aspek kolaborasi lintas sektor, Kodam XIII/Merdeka secara aktif bermitra dengan pemerintah daerah, Polda Sulawesi Utara, Kesbangpol, serta Dinas Sosial dalam penanganan ancaman non-militer seperti radikalisme, penyelundupan lintas batas, dan bencana alam. Strategi kolaborasi ini sesuai dengan konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana seluruh komponen bangsa terlibat dalam menjaga ketahanan nasional. Meskipun demikian, hambatan utama yang ditemui adalah keterbatasan sumber daya personel, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan mobilisasi, serta keterbatasan koordinasi teknis antar instansi.

Pembahasan hasil penelitian menggunakan kerangka teori strategi (Ends, Ways, Means). Dari perspektif 'Ends', tujuan Kodam adalah terciptanya stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat multikultural. Dari perspektif 'Ways', cara yang ditempuh berupa pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan sinergi lintas sektor. Sedangkan dari perspektif 'Means', sarana yang digunakan adalah sumber daya personel, peralatan, dukungan pemerintah daerah, serta modal sosial

masyarakat lokal. Analisis ini memperlihatkan bahwa strategi Kodam telah berhasil mengintegrasikan sarana, cara, dan tujuan secara proporsional, meskipun perlu ditingkatkan pada aspek pemanfaatan teknologi informasi dan pemetaan potensi konflik.

Lebih jauh, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi OMSP Kodam XIII/Merdeka memiliki relevansi terhadap konsep Human Security (UNDP, 1994), karena orientasinya tidak hanya pada keamanan negara, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari ancaman ketidakstabilan sosial. Dengan pendekatan ini, Kodam mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kerentanan masyarakat di wilayah perbatasan. Strategi ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang memiliki kondisi multikultural serupa.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa implementasi OMSP Kodam XIII/Merdeka merupakan praktik strategis yang efektif dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sulawesi Utara. Strategi ini sekaligus memperlihatkan bahwa OMSP bukan hanya instrumen pertahanan non-militer, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang relevan dengan dinamika ancaman kontemporer.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Kodam XIII/Merdeka memiliki peran signifikan dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat multikultural di Sulawesi Utara. Melalui pendekatan teritorial, komunikasi sosial, dan kolaborasi lintas sektor, Kodam XIII/Merdeka mampu menekan potensi konflik, meningkatkan kohesi sosial, serta menumbuhkan rasa aman di tengah kompleksitas tantangan nonmiliter. Penerapan kerangka *Ends - Ways - Means* memperlihatkan kesesuaian antara tujuan menjaga stabilitas sosial, cara yang ditempuh melalui pembinaan masyarakat, serta sarana yang tersedia, meskipun masih terdapat keterbatasan

sumber daya dan hambatan koordinasi.

Secara lebih luas, penelitian ini menegaskan bahwa OMSP bukan sekadar tugas tambahan TNI, melainkan instrumen strategis dalam membangun ketahanan nasional berbasis masyarakat. Implementasi strategi Kodam XIII/Merdeka menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan militer dapat bersifat humanis, adaptif, dan kolaboratif. Ke depan, optimalisasi OMSP membutuhkan penguatan sumber daya, peningkatan kapasitas koordinasi antarinstansi, serta dukungan regulasi yang lebih komprehensif agar mampu menjawab dinamika ancaman yang semakin kompleks.

Saran yang perlu dilakukan Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas personel Kodam XIII/Merdeka dalam bentuk pelatihan multidimensi yang mencakup komunikasi lintas budaya, manajemen konflik, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembinaan teritorial. Hal ini penting agar prajurit tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat.

Kedua, koordinasi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, lembaga sipil, akademisi, dan media perlu lebih diinstitusionalisasi melalui forum reguler yang terstruktur. Dengan demikian, strategi OMSP dapat dijalankan secara lebih sinergis, berkelanjutan, dan terintegrasi ke dalam program pembangunan nasional maupun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
- Baylis, J., Wirtz, J. J., & Gray, C. S. (2017). *Strategy in the contemporary world: An introduction to strategic studies* (6th ed.). Oxford University Press.
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era*. Lynne Rienner Publishers.

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewantara, H. (2022). Evaluasi strategi pertahanan nonmiliter dalam konteks OMSP TNI. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(2), 155–172.
- Dewi, S. (2020). OMSP: Studi pada pemberdayaan wilayah pertahanan oleh TNI AD. *Jurnal Pertahanan Nusantara*, 6(2), 112–129.
- Effendi, T. N. (2021). Ketahanan sosial dalam menghadapi ancaman nonmiliter. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 145–160. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v11i2.1290>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Halkis, Mhd, 2022, Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu pengantar, (trans. Philosophy of Science on Defense An introduction), Unhan Press, Bogor
- Kane, T. (2020). *Military strategy and organizational theory: Balancing ends, ways, and means*. Routledge.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2020*. Kemhan RI.
- Lykke, A. F. (1989). Defining military strategy. In J. Boone Bartholomees Jr. (Ed.), *U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy* (pp. 111–115). U.S. Army War College.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Putnam, R. D. (2001). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rachman, D. (2020). OMSP dan transformasi peran TNI dalam pembangunan nasional.

*Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 45–63.

Rahman, A. (2021). Defense diplomacy and domestic stability: The role of armed forces in peacebuilding. *Asian Journal of Peace and Security Studies*, 5(1), 23–39.

Rahman, A., & Yusuf, M. (2022). Implementasi Operasi Militer Selain Perang di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 8(1), 33–48.

Salim, A. (2020). *Ketahanan nasional dalam perspektif geopolitik dan geostrategi*. Prenadamedia Group.

Saputra, E. (2023). Peran Kodam XIII/Merdeka dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat Sulawesi Utara. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 3(2), 87–104.

Sari, L. P. (2023). Pendekatan pentahelix dalam sinergi pertahanan dan pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keamanan Nasional*, 4(1), 67–82.

Sihombing, T. (2021). Pembinaan teritorial TNI dan ketahanan sosial masyarakat. *Jurnal Bela Negara*, 9(2), 133–150.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhadi, M. (2021). Sishankamrata sebagai paradigma pertahanan semesta. *Jurnal Pertahanan Indonesia*, 7(3), 211–228.

Suryani, D., & Nurlina, R. (2020). Kohesi sosial dan stabilitas masyarakat multikultural. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 25–40.

Syahputra, I. (2023). Peran TNI dalam menanggulangi konflik sosial berbasis komunitas. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 67–82.

<https://doi.org/10.22146/jkn.79421>

Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton University Press.

UNDP. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*.

Widodo, R. (2022). OMSP dan ketahanan sosial: Kajian strategis dalam konteks



pertahanan nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 98–115.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.